

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan upaya investasi bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa kedepannya. Pendidikan salah satu sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan, hampir tidak ada sekelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang/primitif (Utamy, R., Ahmad, S., & Eddy, S 2020, hlm 225-236). Untuk itu dibutuhkan mutu pendidikan yang tertuju pada mutu lulusan yang baik, namun hanya bisa dihasilkan jika dalam proses pendidikan itu sendiri bermutu yang baik. (Sukmadinata, 2010, hlm. 6-7). Program untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan merupakan hal yang teramat penting. Untuk melaksanakan program mutu pendidikan diperlukan dasar yang kuat, yaitu (a) Komitmen pada perubahan, (b) Pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada, (c) Mempunyai visi yang jelas terhadap masa depan, (d) Mempunyai rencana yang jelas. (sukmadinata, 2010, hlm 8-9).

Menurut sukmadinata (2010, hlm. 9) perlu adanya prinsip yang harus diterapkan dalam program mutu pendidikan diantaranya, sebagai berikut : (a) Peningkatan mutu pendidikan dalam memperbaiki system pendidikan, (b) Prinsip pengembangan atau proses untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. (c) Peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan norma kepercayaan lama harus diubah. (d) Para profesional pendidikan harus membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global. (e) Kunci utama peningkatan mutu adalah komitmen pada perubahan. (f) Profesional di bidang pendidikan yang harus memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan siswa memasuki pasar kerja global. (g) Program peningkatan mutu dalam bidang komersial dirancang untuk menunjang pendidikan para professional. (h) Dibutuhkan program peningkatan mutu pendidikan baik terhadap siswa orangtua dan maupun masyarakat manajemen pendidikan dengan program- program yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat.

Juni Sihol Marito Br Tamba, 2023

MANAJEMEN PROGRAM GURU PENGGERAK DAERAH TERPENCIL DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAPPI

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

Ada enam cara dalam mendefinisikan mutu pendidikan, dengan menekankan bagian, aspek, atau hubungan tertentu dari kerangka dasar tersebut.

Tampilan produktivitas Menurut pandangan ini, keberhasilan sistem dipandang tergantung pada pencapaian keluaran/hasil yang dicita- citakan. Menurut pandangan ini, indikator keluaran/hasil/dampak adalah yang paling dominan atau bahkan satu-satunya jenis indikator kualitas yang perlu dipantau

1. Pandangan efektivitas instrumental. Menurut pandangan efektivitas instrumental ada perspektif yang jelas untuk pemilihan indikator konteks, input dan proses, yaitu efek yang diharapkan pada hasil.
2. Perspektif adaptasi Pandangan ini "melampaui" perspektif efektivitas instrumental dengan tidak hanya melihat pertanyaan bagaimana melakukan sesuatu dengan benar, tetapi pertama-tama mempertimbangkan pertanyaan tentang bagaimana melakukan hal yang benar.
3. Perspektif ekuitas Ketika input, proses dan hasil dianalisis untuk distribusi yang setara atau "adil" di antara peserta pendidikan dengan karakteristik yang berbeda, kesetaraan adalah aspek utama untuk menilai kualitas pendidikan.
4. Perspektif efisiensi. Perspektif ini dapat dilihat sebagai tuntutan lebih lanjut pada pandangan produktivitas dan efektivitas instrumental, dengan mempertimbangkan hasil setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin.
5. Pandangan yang terputus-putus yaitu sebuah Pandangan alternatif untuk mempertimbangkan setiap elemen "sendiri" dan menilai apakah itu dimanifestasikan dengan cara yang dapat diterima, atau pada tingkat yang dapat diterima. . (Scheerens, J. 2004, hlm 115-138).

Ini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu dapat ditentukan oleh berbagai macam factor. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak sekali permasalahan kualitas yang dihadapi dalam dunia pendidikan, mulai dari kualitas lulusan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan guru, serta profesionalisme dan kinerja guru. (Yuli, N.G., Haningsih, S., & Adikrishna, R., 2011, hlm 156-163).

Selain itu, mutu juga dapat berkaitan dengan manajerial pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, sarana dan prasarana, sarana pendidikan, media, sumber belajar, alat

dan bahan pelatihan, iklim sekolah, lingkungan pendidikan, dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan. Semua kelemahan kualitas komponen pendidikan tersebut menyebabkan rendahnya kualitas lulusan. (Irmayani, H., Wardiah, D., & Kristiawan, M., 2018, hlm 112-121).

Dari pendapat tersebut menjelaskan bahwa beberapa faktor seperti guru dan keprofesionalan guru, serta manajerial pimpinan pendidikan terutama pengelolaan suatu program pendidikan komponen terpenting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sejalan dengan pendapat penelitian yang memperlihatkan gambaran profesionalisme guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dilihat dari empat aspek yaitu kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, kompetensi social, kompetensi professional. (Yunus 2016, hlm 112-118)

UNESCO juga menyebutkan bahwa kualitas guru sebagai komponen penting dalam pendidikan, berada di urutan ke-14 dari 14 negara berkembang di dunia (Yunus, 2016, hlm 112-118). Oleh karena itu, guru profesional merupakan kunci peningkatan mutu pendidikan yang mendorong kemajuan suatu bangsa.

Kualitas pendidikan dapat dilihat berdasarkan capaian lulusan serta kemampuan literasi membaca menulis, dan sains anak Indonesia masih rendah (Adzkie, A. 2018). Hal tersebut diantaranya didukung oleh pencapaian hasil INAP, PISA, dan TIMSS. Data INAP Balitbang Kemendikbud yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pencapaian siswa dominan pada kategori kurang. Secara berturut-turut persentase penguasaan matematika, membaca dan sains yang termasuk dalam kategori kurang secara berturut-turut sebesar 77,13%, 44,83% dan 73,61%.

Sementara yang termasuk dalam kategori baik adalah 2,29%, 6,06%, dan 1,01%. Sisanya, berada dalam kategori cukup ("Hasil Indonesian National Assesment Programme (INAP)", 2016).

Masalah kualitas lainnya terlihat dari masih banyak angka usia sekolah yang masih buta huruf didaerah pedalaman Papua terutama di daerah Kabupaten Mappi, hal ini terlihat dari data yang diperoleh BPS Angka Melek huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 pada tahun 2015 sebesar 92,41 % dan pada tahun 2016 sebesar 92,19% . (Papua.bps.go.id).

Dapat dilihat secara jelas data angka melek huruf mengalami penurunan, seharusnya diharapkan setiap tahun mengalami kenaikan peningkatan kemampuan dalam hal huruf, ini berarti rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Mappi ditinjau dari masih banyak angka buta huruf yang meningkat diusia sekolah. Oleh karena itu salah satu peranan guru sangat penting, karena dibutuhkan Guru yang dapat memenuhi standar pendidikan dan ketersediaan Guru untuk memenuhi peningkatan nilai mutu pendidikan di kabupaten Mappi.

Sebuah tanggung jawab bagi pemerintah menjamin adanya pembelajaran yang berkualitas yang harus dirasakan setiap anak secara menyeluruh. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak-anak di daerah pelosok Indonesia yang masih mengalami keterbatasan kemampuan literasi membaca, menulis dan berhitung, hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan kekurangan guru profesional yang terlinat di daerah 3T tersebut.

Data dibawah ini dapat dilihat rasio siswa per guru diwilayah daerah tertinggal. Berdasarkan data tersebut, Rasio Siswa per-Guru (RSG) wilayah tertinggal berkisar antara 6,86 (Kabupaten Bima) terendah sampai dengan 23,3 (Kabupaten Tolikara) tertinggi, dengan rasio siswa per-guru nasional sebesar 14,73. Apabila dikaitkan dengan Standar Nasional (14,73) maka terdapat 16 Kabupaten (16,16%) yang lebih tinggi dari Normal.

Data sebaran rasio sebaran Guru-Siswa secara Nasional,yaitu 1) Kabupaten Musi Rawas Utara, 2) Kabupaten Ketapang, 3) Kabupaten Kepulauan Yapen, 4) Kabupaten Puncak Jaya, 5) Kabupaten Biak Numfor, 6) Kabupaten Lebak, 7) Kabupaten Landak, 8) Kabupaten Pandeglang, 9) Kabupaten Manggarai, 10) Kabupaten Sumba Barat Daya,

Juni Sihol Marito Br Tamba, 2023

MANAJEMEN PROGRAM GURU PENGGERAK DAERAH TERPENCIL DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAPPI

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

11) Kabupaten Jaya Wijaya, 12) Kabupaten Yakuimo, 13) Kabupaten Paniai, 14) Kabupaten Lanny Jaya, 15) Kabupaten Mappi, 16) Kabupaten Tolikara. Rasio Siswa per-Guru(RSG) yang dimaksud adalah jumlah siswa dibagi dengan jumlah guru yang ada. Semakin tinggi angka rasio, maka semakin banyak siswa yang dilayani oleh satu guru.

Data menunjukkan salah satu kabupaten tertinggal yang menunjukkan rasio siswa per-guru terbesar kedua yaitu Kabupaten Mappi.

Salah satu daerah yang mengalami krisis ketersediaan guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai adalah Kabupaten Mappi. Meskipun Kabupaten Mappi telah menjadi daerah otonom baru sejak dimekarkan dari Kabupaten Merauke pada tahun 2002, namun keterbatasan tenaga guru menjadikan pembangunan pendidikan Kabupaten Mappi belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data menunjukkan pada tahun 2015-2017 bahwa tingkat kualifikasi guru beserta nilai IPM, IPK/APK serta jumlah lulusan jenjang SD ke SMP masih sangat minim, berikut data tersedia dalam .

Tabel 1.1.

Neraca Pendidikan Kabupaten Mappi.

Tahun Ajaran	IPM	APK (%)	APM(%)	Peserta didik	Kualifikasi Guru	
				SD/SMP	≤S1	≥S1
2015/2016	56,11	SD:62,2 SMP : 72,0	SD:37,8 SMP: 28,0	SD: 220.458 SMP. 4.502	SD ; 66,9% SMP : 12,6%	SD : 33,1% SMP: 87,4%
2016/2017	56,5	SD:86,7 SMP:64, 5	SD:61,8 SMP:31,8	SD: 224.863 SMP:5.113	SD ; 73,3% SMP : 12,6%	SD ; 26,7% SMP : 87,4%

Sumber : <https://npd.kemdikbud.go.id/>

Dari tabel 1.1 diatas memperlihatkan masih rendahnya mutu pendidikan di Kabupaten Mappi dimana nilai IPM tahun 2015/2016 sebesar 56,11 mengalami penurunan IPM pada tahun 2016/2017 sebesar 56,5, hal ini bisa dilihat dapat terjadi

karena kualifikasi pendidikan para Guru pada saat itu masih persentasi kualifikasi Guru jenjang S1 lebih sedikit dibandingkan guru dengan kualifikasi tidak S1, terlihat pada jenjang SD tahun 2015/2016 kualifikasi \geq S1 sebesar 33,1 % sedangkan \leq S1 sebesar 66,9 %, dan pada tahun 2016/2017 mengalami kenaikan persentasi pada kualifikasi \leq S1 menjadi 73,3%. Nilai IPM yang rendah juga didukung dengan data mutu Sumber Daya Manusia yang rendah salah satunya masih belum mengalami perubahan yang signifikan atas kualitas perubahan angka Melek Huruf di Kabupaten Mappi,

Berdasarkan data dari BPS Kab. Mappi tahun 2017 memperlihatkan bahwa rasio ketersediaan guru dan siswa yang tersebar di 15 Distrik masih begitu tidak seimbang. Berikut adalah data rasio ketersediaan siswa terhadap guru di Sekolah Dasar Negeri dan Swasta menurut distrik ditunjukkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Rasio Siswa Terhadap Guru di Sekolah Dasar se-Kabupaten Mappi 2017

No	Distrik	Rasio Siswa Terhadap Guru	
		Negeri	Swasta
1.	Obaa	24	28
2.	Nambiom an Bapai	100	29
3.	Edera	23	27
4.	Venaha	46	61
5.	Minyamur	48	83
6.	Passue	46	36
7.	Haju	65	60
8.	Asue	42	41
9.	Citak Mitak	52	39
10.	Kaibar	50	72
11.	Syahcame	27	35
12.	Bangi	78	49
13.	Yakomi	21	83
14.	Passue Bawah	36	49
15.	Tizain	74	157
Rerata/Jumlah		38	37

(Sumber: BPS Kab. Mappi, 2017)

Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2, ayat 2, poin 5 menyatakan bahwa “Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk 32 peserta didik”. Namun, berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio siswa terhadap guru di Kabupaten Mappi berdasarkan data untuk tiap distrik baik pada SD Negeri maupun Swasta menunjukkan masih banyak.

Juni Sihol Marito Br Tamba, 2023

MANAJEMEN PROGRAM GURU PENGGERAK DAERAH TERPENCIL DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAPPI

Universitas Pendidikan Indonesia | respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu

yang melebihi angka yang menjadi standar. Untuk memenuhi ketersediaan guru di daerah pedalaman mendukung keterlaksanaan pendidikan yang berkualitas, selama ini telah dijalankan berbagai macam program yang di dalamnya melibatkan peran dari pemerintah daerah diantaranya; Guru Garis Depan (GGD), Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM3T), serta program pemerintah pengangkatan 1000 guru dalam Program Pegawai Pemerintah Kontrak (P3K).

Mengingat begitu pentingnya peran guru terhadap peningkatan mutu pendidikan, maka Pemerintah Kabupaten Mappi menjalin kerjasama Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) FISIPOL UGM dan Gugus Tugas Papua UGM menyelenggarakan program rekrutmen guru kontrak daerah yang dinamakan Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) dengan sumber anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Mappi. Program tersebut dilakukan bertujuan menggerakkan kegiatan pendidikan di Kabupaten Mappi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Mappi.

Program pengelolaan penyediaan dan pelaksanaan Sumber Daya Manusia terutama Guru penting dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama di daerah terpencil 3T. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan GGD sangat membantu dan berperan penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan melalui pengembangan Sekolah Efektif (Rivalina, 2016, hlm. 77- 86) . Selain itu, dengan penelitian serupa terkait peran GGD didapati sangat berdampak baik bagi peningkatan mutu pendidikan di Sumba (Danga, S.R, 2018, hlm 234-240). Hasil penelitian lain dalam penelitian manajemen program Traveling dan Teaching dan Smart Center Komunitas 1000 Guru Malang menunjukkan indikator pencapaian mutu sekolah meliputi peningkatan partisipasi masyarakat, prestasi akademik dan non akademik, citra sekolah di masyarakat, dan kualitas fasilitas sekolah. (Asriadi, A., Sobri, A. Y., & Sultoni, S. 2019, hlm.104-109).

Oleh karena itu, pemerintah harus terus berupaya untuk menyediakan tenaga guru yang berkualitas untuk mendorong pengembangan pendidikan terlebih khusus di daerah-daerah pelosok negeri. Sampai saat ini program GPDT di Kabupaten Mappi telah memasuki angkatan ke 4 pada proses perekrutannya yang dimulai dari tahun 2017 hingga

2019. Seiring dengan pelaksanaan dan program GPDT di Kabupaten Mappi, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan program tersebut baik dari sisi manajemen mutu mengenai aspek perencanaan program, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, beberapa permasalahan yang diperoleh dalam program ini dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, yakni: (1) Kurangnya guru yang sesuai kualifikasi lulusan PGSD (2) Kualitas siswa pedalaman yang hampir seluruh jenjang minim pengetahuan literasi membaca, menulis, berhitung; (3) Kesadaran masyarakat pedalaman masih kurang tentang pentingnya pendidikan; (4) Masih banyak Guru Lokal yang tidak melaksanakan tugas dengan seharusnya; (6) Minimnya jumlah lulusan setiap tahunnya tingkat SD; (7) Terdapat beberapa Guru Penggerak Daerah Terpencil yang tidak betah ditempat tugas; (8) Kurangnya Evaluasi dalam bentuk penilaian, pengawasan serta perbaikan secara terus menerus dalam Program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT).

Merujuk pada beberapa permasalahan diatas perlunya peninjauan mengenai Implementasi Managemen program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) dalam mewujudkan mutu pendidikan di kabupaten mappi, maka perlu untuk dilakukan sebuah upaya penilaian implementasi program yang masih berjalan sampai dengan 2 periode perpanjangan kontrak daerah, dimana satu periode lama kontrak kerja 2 tahun dan diperpanjang lagi di periode ke 2 selama dua tahun berikutnya. Jika permasalahan diatas diabaikan akan sangat berdampak terhadap pencapaian tujuan program dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Kabupaten Mappi. Serta hal ini dapat menjadi pertimbangan bahan evaluasi program ini dapat dilanjutkan.

Merujuk dari permasalahan diatas terlihat bahwa pentingnya suatu manajemen yang dilakukan secara baik dalam suatu organisasi sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang dilaksanakan secara benar dan terorganisasi sesuai dengan jadwal. (Siagian, 2018. hlm.19). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian mengenai

implementasi program kampus mengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan SDN 4 Gersik dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat membantu tugas-tugas yang ada yaitu, membantu proses pembelajaran, membantu adaptasi teknologi, serta membantu administrasi sekolah. (Jannah, F. K., & Mahardhan, A. J, 2022. Hlm 204-210)

Pendapat lain dari suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan hasil evaluasi bagian input pada program GGD yang berkaitan dengan peserta, kepanitiaan dan bimbingan teknis GGD hasil penelitian ini menjelaskan bahwas Semua sumber daya yang terlibat dalam program GGD baik pusat sampai daerah berpartisipasi melakukan program ini dengan baik. (Fitriyani, F., Sudjanto, B., Suryadi, S., & Matin, M. 2020, hlm. 383-397),

Kemudian dari penelitian lain juga diperoleh hasil mengenai manajemen kualitas dan keefektivitasan yaitu.

Penelitian mengenai *“Education Quality Assurance Management in the Faculty of Health Science , Singaperbangsa Karawang University”*. Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan harus mencakup analisis kebutuhan masing-masing program studi dengan komunikasi, konsultasi dan koordinasi, membangun tim, mengevaluasi dan merevisi standar mutu secara berkesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan. (Wahyudin, U. R., & Permana, H., 2020, hlm 510-512)

Berdasarkan pemaparan di atas dan dengan mempertimbangkan berbagai persoalan yang terjadi di lapangan dan juga program tersebut yang masih berjalan sampai saat ini, sehingga peneliti merasa sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Manajemen Program Guru Penggerak Daerah Terpencil Dalam Meningkatkan Mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Mappi”*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini mengenai manajemen program dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, factor pendorong dan penghambat serta hasil dari program, sehingga harapannya ketika program ini dilanjutkan hasil penelitian dapat menjadi acuan pertimbangan untuk bahan evaluasi perbaikan yang dihasilkan program ini sehingga dapat meningkatkan Mutu Sekolah Dasar di Kabupaten Mappi.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini berfokus untuk menilai keefektivitasan program ini dalam mewujudkan pemerataan guru di kabupaten Mappi. Pokok masalah tersebut akan dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Perencanaan Program Guru Penggerak Daerah Terpencil.?
2. Bagaimana Pengorganisasian Program Guru Penggerak Daerah Terpencil.?
3. Bagaimana Pelaksanaan Program Guru Penggerak Daerah Terpencil?
4. Bagaimana Evaluasi Program Guru Penggerak Daerah Terpencil?
5. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen program Guru penggerak daerah Terpencil dalam meningkatkan mutu sekolah dasar di Kabupaten Mappi?
6. Bagaimana Hasil Manajemen Program Guru Penggerak Daerah Terpencil dalam meningkatkan mutu sekolah dasar Kabupaten Mappi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang dan Rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mendeskripsikan Perencanaan Program Guru Penggerak Daerah Terpencil
2. Untuk Mendeskripsikan Pengorganisasian Program Guru Penggerak Daerah Terpencil
3. Untuk Mendeskripsikan Pelaksanaan Program Guru Penggerak Daerah Terpencil
4. Untuk Mendeskripsikan Evaluasi Program Guru Penggerak Daerah Terpencil
5. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat program Guru penggerak daerah Terpencil dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Mappi
6. Untuk Mendeskripsikan Hasil Manajemen Program Guru Penggerak Daerah Terpencil dalam meningkatkan mutu sekolah dasar di Kabupaten Mappi

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas dalam penelitian diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi pendidikan khususnya yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan suatu program dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah;
2. Dari aspek kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membahas efektivitas pelaksanaan kebijakan melalui program guru kontrak daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan di suatu daerah ;
3. Dari segi praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif sudut pandang ataupun dapat digunakan sebagai sebuah rekomendasi bagi tindak lanjut dari pelaksanaan program GPDT (Guru Penggerak daerah Terpencil) baik oleh pemerintah daerah, juga oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sistematika penulisan tesis penelitian ini disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun Akademik 2019 dengan pengesahan oleh rektormelalui Peraturan Rektor UPI Nomor 6411/UN40/HK/2019. Adapun rancangan struktur penulisan tesis initerdiri atas lima bab yang dimulai dari:

Bab 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi pembahasan teoritis tentang efektivitas pelaksanaan program, kebijakan pendidikan, dan konsep tentang Guru Kontrak daerah dan Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT), serta beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Juni Sihol Marito Br Tamba, 2023

MANAJEMEN PROGRAM GURU PENGGERAK DAERAH TERPENCIL DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN MAPPI

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | [Perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)

Bab 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang desain penelitian, metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data hasil penelitian.

Bab 4 : TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan temuan di lapangan tentang objek penelitian Efektivitas pelaksanaan program Guru Penggerak Daerah Terpencil (GPDT) dalam mewujudkan pemerataan Guru di Kabupaten Mappi.

Bab 5 : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menjelaskan Efektivitas pelaksanaan program GPDT dan bagaimana keefektifitasannya dalam mewujudkan pemerataan guru di Kabupaten Mappi, permasalahan yang terjadi untuk kemudian ditemukan solusinya.